

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP LOMBOK AIKMEL

M. Abyan Ramzi¹

abyanramzi015@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Nurabiah²

nurabiah@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui proses pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel. Tujuan ini dicapai dengan melakukann kegiatan magang pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel selama 4 (empat) bulan lamanya dengan melakukan aktivitas pada bagian akuntansi untuk dapat mengetahui secara langsung tentang prosedur pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Syariah Indonesia. Proses prosedur pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah memiliki beberapa tahapan dalam mengajukan permohonan pembiayaan ini yaitu beberapa prosedur yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Adapun tahapan prosedur analisis kelayakan pembiayaan ini mencakup 7 tahapan yaitu; pengajuan permohonan pembiayaan, BI checking, pemeriksaan tempat (survey), Analisa pembiayaan, pendentanganan akad, pembukaan rekening dan pencairan akad. Pada tahapan analisa pembiayaan dilakukan untuk dapat menilai kelayakan pembiayaan calon nasabah secara lebih dalam lagi dengan menggunakan prinsip 5C tersebut. Selain menggunakan prinsip 5C, bank BSI KCP Lombok Aikmel mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kewaspadaan terhadap risiko yang akan terjadi serta tentunya menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan KUR dapat membantu para pelaku usaha dalam memulai menjalankan bisnisnya, serta berperan memberikan informasi mengenai siklus perputaran usaha agar tetap stabil sehingga dapat membantu dalam mengembangkan usaha nasabah agar lebih berkembang lagi.

Kata Kunci: Prosedur, Pembiayaan, KUR

ABSTRACT

The purpose of this report is to understand the process of applying for People's Business Credit (KUR) financing at Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel. This objective was achieved by conducting an internship at PT Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel for 4 (four) months by carrying out activities in the accounting department to be able to directly understand the procedure for applying for People's Business Credit (KUR) financing at PT Bank Syariah Indonesia. The financing procedure process submitted by prospective customers has several stages in submitting this financing application, namely several procedures that must be completed by prospective customers. The stages of this financing feasibility analysis procedure include 7 stages, namely; submitting a financing application, BI checking, site inspection (survey), financing analysis, signing the contract, opening an account and disbursing the contract. At the financing analysis stage, it is carried out to be able to assess the financing

feasibility of prospective customers in more depth by using the 5C principle. In addition to using the 5C principle, BSI Bank KCP Lombok Aikmel prioritizes the principles of convenience, speed, security, and awareness of potential risks and of course uses sharia principles. KUR financing can help business actors in starting their business, and plays a role in providing information regarding the business cycle so that it remains stable so that it can help in developing customer businesses so that they can grow even further.

Keywords: *Procedure, Financing, KUR*

PENDAHULUAN

MBKM adalah mode pembelajaran pendidikan tinggi yang mandiri dan serbaguna yang dirancang untuk menciptakan komunitas pembelajaran kreatif yang tidak membatasi yang memenuhi kebutuhan mahasiswa (Meke et al., 2022). Kampus merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat melalui praktik langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier di masa mendatang. MBKM mempunyai tujuan untuk menyajikan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel di PT, menyediakan budaya belajar yang inovatif dan merdeka sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, pemenuhan hak belajar berdasarkan pendekatan berbasis kehidupan, kapabilitas, dan transdisipliner untuk meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa, memfasilitasi hak belajar sesuai dengan minat dan potensi mahasiswa agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian, memberikan wawasan dan pengalaman agar mahasiswa menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan (Journal et al., 2022).

Tempat saya magang di bank syariah indonesia. Bank syariah indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu satunya bank syariah di indonesia, tahap terhadap krisis moneter (Akuntansi Dasar Sesuai Dengan SAK EMKM, 2023).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari kreditur, namun kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh kreditur. Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah adalah koperasi dan UKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, namun belum memiliki agunan cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan (Inkad, 2023).

UMKM ini merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia (UU No. 21 yang tingkat ekonomi dan keterampilannya terbatas). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang ekonomi Indonesia, terutama selama periode krisis. Pengembangan UMKM ditujukan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih dinamis dan progresif, meningkatkan serta memajukan kemampuan UMKM agar lebih adaptif dan independen. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam menciptakan kesempatan kerja, menyeimbangkan distribusi pendapatan, merangsang pertumbuhan ekonomi, serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Alya & Rahman, 2024).

Salah satu bentuk dukungan nyata perbankan terhadap rill adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang produktif namun belum memiliki agunan yang cukup untuk mengakses pembiayaan di perbankan umum. Tujuan utama KUR adalah meningkatkan akses permodalan, memperkuat struktur ekonomi masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Dalam konteks perbankan syariah,

penyaluran KUR dilaksanakan berdasarkan akad syariah, sehingga tidak mengandung unsur bunga, melainkan sistem margin atau bagi hasil (Sembiring, 2021).

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lombok Aikmel merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan KUR di wilayah lombok timur. Sebagai lembaga yang berbasis syariah, BSI KCP Lombok Aikmel berkomitmen untuk memberikan layanan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan mendukung pengembangan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Dalam pelaksanaannya, BSI KCP Lombok Aikmel memiliki prosedur tertentu dalam pengajuan pembiayaan KUR yang meliputi tahapan administrasi, analisis kelayakan, hingga pencairan dana kepada nasabah. Prosedur ini dirancang agar pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan perbankan, serta mendukung prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) (Sembiring, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang dengan tujuan untuk mengetahui ‘prosedur pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lombok Aikmel’. Melalui magang ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses dan mekanisme pengajuan pembiayaan KUR di lembaga keuangan syariah, serta mengetahui bagaimana peran BSI dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Prosedur

Prosedur sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Pada akhirnya, prosedur menjadi acuan bagi organisasi dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjalankan fungsi tertentu. Prosedur itu sendiri merupakan serangkaian langkah-langkah yang telah ditetapkan dan menjadi pola dalam pelaksanaannya. Prosedur didefinisikan sebagai “serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan” (Puspitawati, Anggadini, 2011:23)

Menurut Mulyadi (2001) karakteristik prosedur di antaranya:

- Prosedur menunjung tercapainya tujuan organisasi.
- Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan

Pembiayaan

Menurut Antonio (2011), menjelaskan bahwa pembiayaan dalam sistem perbankan syariah bukan hanya kegiatan menyalurkan dana, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi bank terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pembiayaan syariah mendorong terciptanya kemitraan antara bank dan nasabah, bukan hubungan kreditur dan debitur seperti sistem konvensional. Hal ini berarti kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko dan mendapatkan mamfaat dari hasil usaha yang dijalankan

Adapun jenis-jenis pembiayaan

1. **Pembiayaan Murabahah (Jual Beli dengan Margin)**
Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual (bank syariah) menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan kepada pemberi (nasabah). Nasabah membayar secara angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan (Bank muamalat Indonesia, wiroso, 2009)
2. **Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)**
Akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) untuk menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal. Contohnya pembiayaan modal kerja UMKM (Antonio, 2001 & Asmita, 2023).
3. **Pembiayaan Musyarakah (Kerja Sama Modal Bersama)**
Akad kerja sama di mana dua pihak atau lebih menyertakan modal untuk suatu usaha, dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai porsi modal. Contohnya, pembiayaan proyek pembangunan perumahan atau investasi usaha bersama (Wulandari, 2021 & Karim, 2010).
4. **Pembiayaan Ijarah (Sewa Menyewa)**
Akad sewa menyewa atas barang atau jasa dengan imbalan sewa (ujrah). Terdapat bentuk lanjutan yaitu Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), dimana kepemilikan berpindah setelah masa sewa berakhir. Contohnya pembiayaan alat berat, kendaraan, atau properti (Ascarya, 2007).
5. **Pembiayaan Salam**
Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah(2023) akad jual beli barang dengan sistem pesanan, di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati. Contohnya pembiayaan hasil pertanian yang dipesan sebelum panen.

Manfaat-manfaat Pembiayaan

1. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**
Menurut Asmita (2023), pembiayaan syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian modal usaha yang halal dan adil. Pembiayaan ini membantu masyarakat kecil agar mampu mengembangkan usaha tanpa tekanan bunga.
2. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM**
Menurut Wulandari (2021), pembiayaan syariah membantu meningkatkan produktivitas sektor rill, khususnya bagi pelaku UMKM, karena prinsip bagi bagi hasil mendorong kolaborasi antara bank dan nasabah untuk mencapai keuntungan bersama.
3. **Mewujudkan Keadilan Ekonomi**
Menurut Antonio (2001), pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah) mewujudkan keadilan karena keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional, tidak sepihak seperti pada sistem bunga.
4. **Menghindari Riba dan Transaksi Haram**
Menurut Karim (2010), manfaat utama pembiayaan syariah adalah menghindari umat islam dari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga transaksi ekonomi lebih berkah dan sesuai syariat.
5. **Mendorong Etika dan Tanggung Jawab Sosial**
Menurut Ascarya (2007), pembiayaan syariah bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga pendidikan moral karena mengajarkan nilai amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi.
6. **Meningkatkan Inklusi Keuangan**
Menurut KNEKS (2023), pembiayaan syariah memperluas akses masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, terutama masyarakat mikro dan kecil sering membutuhkan pembiayaan tanpa bunga.

7. Mendorong Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Umat
Menurut Ma'rif & Mugiyati (2022), pembiayaan syariah seperti *qardhul hasan* dapat membantu masyarakat miskin atau berdampak bencana dengan pinjaman tanpa bunga, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial.
8. Menumbuhkan Stabilitas Ekonomi
Menurut Baihaqi (2023), sistem pembiayaan syariah berbasis aset dan prinsip keadilan membuat sektor keuangan lebih stabil karena tidak spekulatif dan tidak berbasis bunga.
9. Mendukung Tujuan Maqashid Syariah
Menurut Kurrohman (2021), pembiayaan syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk mencapai maqashid syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui kegiatan ekonomi yang adil dan bermanfaat.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada debitur individu, badan usaha, atau kelompok usaha produktif dan layak, namun memiliki agunan tambahan yang cukup. Tujuan utama program ini adalah untuk memperkuat struktur ekonomi rakyat, mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan informal, serta menciptakan lapangan kerja baru (Kemenko Perekonomian, 2023).

Macam Macam Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. KUR Mikro BSI
Menurut Antonio (2011), menjelaskan bahwa pembiayaan mikro syariah merupakan pembiayaan modal kecil yang menggunakan prinsip jual beli atau sewa (Murabahah atau Ijarah) untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat berpendapatan rendah.
Karakteristik
 - 1) Plafon: hingga Rp 50 juta.
 - 2) Akad Murabahah (jual beli) atau Ijarah (sewa manfaat)
 - 3) Sasaran: UMKM pemula atau usaha kecil yang membutuhkan modal kerja.
2. KUR BSI kecil
Menurut Ismail (2017), menyatakan bahwa pembiayaan usaha kecil syariah di tunjukan untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan, dengan pembiayaan besar dan risiko lebih terukur.
Karakteristik
 - 1) Plafon: Rp 50 juta – Rp 500 juta.
 - 2) Akad: Murabahah atau Ijarah.
 - 3) Sasaran: usaha kecil yang sedang berkembang (expansion).
3. KUR Super Mikro BSI
Menurut Ascarya (2015) menegaskan bahwa pembiayaan super mikro tunduk pada prinsip tahapan pemberdayaan, yaitu memulai dari kebutuhan modal sangat kecil untuk usaha baru atau usaha yang belum bankable.
Karakteristik
 - 1) Plafon: sampai Rp 10 juta.

- 2) Target: Ibu rumah tangga, usaha sangat kecil yang baru mulai dan pekerja tenaga Pemutus Hubungan Kerja (PHK).

METODE

Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 (Empat) Bulan, terhitung tanggal 10 september 2025 sampai dengan 19 Desember 2025. Waktu kegiatan magang ini dilaksanakan harian disesuaikan dengan jam kerja yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel berlokasi di Jl. Pendidikan No. 61A, kel, Aikmel Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur. Yang dimulai sejak pukul 08.00-17.00 pada hari Senin sampai Jumat.

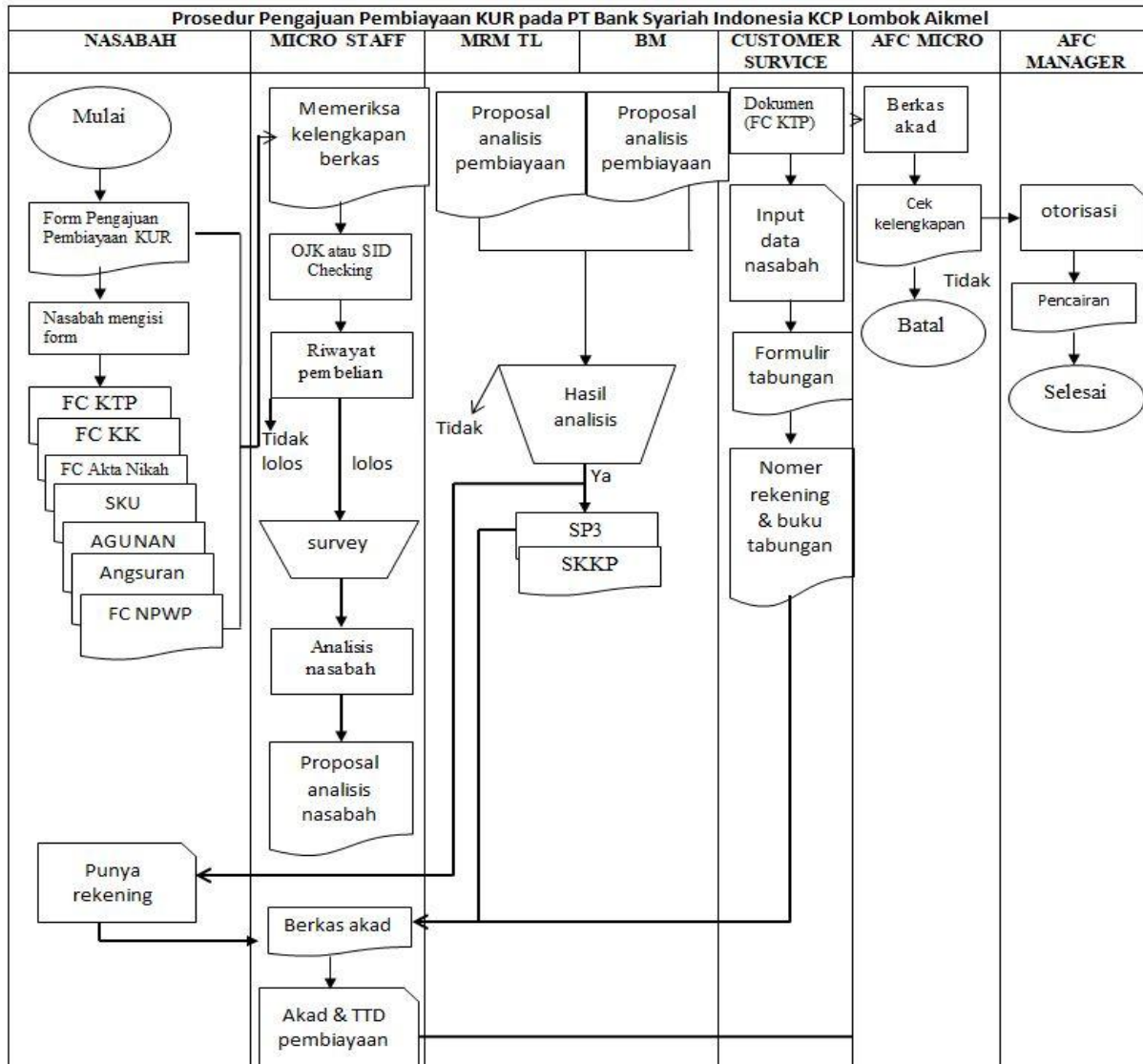
Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis saat melakukan magang sebagai berikut:

1. Berpartisipasi dalam menulis administrasi penarikan uang.
2. Membantu dalam penulisan administrasi nasabah.
3. Membantu nasabah membuka rekening online (Byond By Bsi).
4. Penulis berpartisipasi dalam pengimputan data nasabah.
5. Penulis membantu teller dalam permintaan Otorisasi kepada BOSM untuk penarikan dan setoran tunai nasabah.
6. Penulis membantu Costumer Service dalam pengisian formulir pembukaan rekening nasabah.
7. Penulis berpartisipasi dalam menawarkan produk BSI kepada nasabah.
8. Penulis membantu Penulis berpartisipasi dalam pembukaan rekening online untuk pegawai dapur MBG.
9. Penulis membantu divisi Mikro dalam pembuatan akad pembiayaan KUR Kecil dan KUR Mikro.
10. Penulis berpartisipasi dalam menyusun dan merapikan akad pembiayaan KUR Kecil dan KUR Mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebuah program sebuah program dari pemerintahan indonesia untuk memberikan pinjaman modal kerja atau investasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang produktif dan layak namun belum memiliki agunanan cukup.

Berikut *flowchart* atau prosedur pengajuan pembiayaan KUR BSI KCP Lombok Aikmel:



Gambar 1. Flowchart Produk Pengajuan Pembiayaan KUR PT Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel

Dalam proses penyaluran pembiayaan KUR kepada nasabah, setiap calon nasabah harus melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan sebelum suatu pembiayaan diputuskan oleh pihak bank, tahapan tahapan dalam pengajuan KUR sebagai berikut:

a. Tahapan permohonan pembiayaan KUR

Nasabah mendatangi kantor PT Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel dengan bermaksud menyampaikan maksud dan tujuan yaitu untuk melakukan pengajuan pembiayaan KUR. Nasabah datang dengan membawa persyaratan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP dan pas poto suami istri (apabila sudah menikah).
2. Fotocopy Kartu Keluarga.

3. Fotocopy surat nikah/surat keterangan belum menikah/akta cerai/akta kematian.
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika pembiayaan diatas RP 50 juta.
5. Surat Keterangan Usaha (SKU).
6. Agunan (jaminan), jika ada yang memiliki agunan.

Calon nasabah pengajuan pembiayaan KUR akan ditemui oleh pihak bank (*micro staff*) yang diberi wewenang untuk melayani nasabah dan memberikan edukasi mengenai pembiayaan KUR. Kemudian, calon nasabah akan mengisi formulir aplikasi pengajuan pembiayaan dan ditandatangani sebagai persyaratan dalam pembiayaan.

b. Tahapan *collect* data nasabah

Tahapan *collect* data dilakukan dengan nasabah menyerahkan dokumen persyaratan dan formulir aplikasi pembiayaan yang telah ditandatangani kepada pihak bank (*micro staff*). Data atau berkas dokumen nasabah akan diterima dan diverifikasi sesuai dengan yang asli, apalagi terdapat kesalahan atau kekurangan maka calon nasabah pembiayaan akan diminta melengkapi data terlebih dahulu dan diminta juga untuk menulis nomer telpon yang bisa dihubungi untuk pihak bank (*micro staff*) mengkonfirmasi mengenai perkembangan pengajuan pembiayaan.

c. Tahapan *BI Checking*

Setelah semua persyaratan dan data nasabah telah terpenuhi, maka pihak bank (*micro staff*) akan melakukan *BI Checking* melalui OJK atau Sistem Informasi Debitur (SID). Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah tersebut memiliki riwayat pembiayaan di bank lain. Apabila nasabah menunjukkan memiliki riwayat pembiayaan diatas angka 1, maka proses pengajuan pembiayaan KUR tidak bisa dilanjutkan.

d. Tahapan *survey*

Survey ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan melakukan meninjau langsung ke lokasi tempat usaha nasabah untuk memeriksa dan menilai jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Kunjungan langsung ke tempat usaha dan rumah domisili calon nasabah dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara langsung tempat usaha, rumah domisili dan agunan, serta menggali aktifitas usaha nasabah apakah usaha yang dijalankan itu benar atau salah karena untuk menghindari resiko yang akan dihadapi kemudian. Kunjungan tersebut dilakukan oleh pihak bank (*micro staff*).

e. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah paling penting untuk realisasi pembiayaan. Pada tahapan ini pihak bank dapat menganalisa kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C. Dalam proses analisis, pihak bank akan melakukan penilain 5C, yaitu:

1. *Character* (Karakter), penilaian terhadap karakter atau sifat calon nasabah dalam mengambil pinjaman.
2. *Capacity* (Kemampuan), menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah pembiayaan mampu membayar kewajiban yang diambil.
3. *Capital* (Modal), menilai dari mana saja modal yang didapatkan oleh nasabah, seperti seberapa persentase modal dari pinjaman dan seberapa persentase modal sendiri.
4. *Collectral* (Agunan), tahapan dimana jaminan (agunan) yang dimiliki oleh calon nasabah diserahkan kepada pihak bank selama mengambil pinjaman.
5. *condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), tahapan dimana bank menilai kondisi usaha calon nasabah terhadap prospek kelayakan dalam menerima pinjaman pembiayaan, apakah nanti calon nasabah mampu layak membayar angsuran pembiayaan atau tidak.

f. Tahapan pendatanganan akad

Setelah semua dokumen persyaratan sudah lengkap dan pihak bank sudah melakukan survey dan analisis calon nasabah, maka pihak bank akan membuat analisa dan proposal pembiayaan akan di analisa oleh *Branch Manager* (BM).

Analisa dan proposal pembiayaan yang telah disetujui oleh BM, maka akan dibuatkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP). SKKP ini berupa persetujuan atau penolakan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Permohonan pembiayaan yang disetujui akan dibuatkan surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), SP3 ini akan ditandatangani oleh calon nasabah dan *Branch Manager* selaku pihak bank.

Pihak bank akan menyerahkan sejumlah dana kepada nasabah dengan tujuan pembelian yang sudah jelas, kemudian akan dijelaskan tentang harga barang kepada nasabah. Setelah itu nasabah akan membayar ke pihak bank BSI, bahwasanya ada kelebihan dari harga barang yang telah dibeli. Dengan kesepakatan tersebut di jelaskan pada awal pelaksanaan akad tentang bagi hasil yang telah disepakati.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam pendatanganan akad, yaitu sebagai berikut:

1. Pendatanganan akad dilakukan secara langsung tatapmuka dengan pejabat bank.
2. Setiap halaman pada akad pembiayaan wajib paraf oleh nasabah dan pasangan nasabah, dihadapan pejabat bank.
3. Melakukan dokumentasi, berupa foto saat proses berlangsungnya akad antara pejabat bank, nasabah, pasangan penjamin.
4. Melampirkan surat pengakuan hutang (SPH) yang ditulis langsung oleh nasabah dan ditanda tangani diatas materai.

g. Pembukaan rekening

Setelah tahapan diatas selesai dilaksanakan, pihak bank akan meminta nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tabungan mikro ke *customer service* (CS) untuk hasil dari realisasi akad, pendebetn biaya dan angsuran pembayaran. Tahapan ini dilakukan untuk memudahkan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak bank.

h. Proses pencairan dana

Setelah tahapan akad selesai dilakukan, maka seluruh berkas calon nasabah pembiayaan akan diserahkan kepada *Area Finance Centra Micro* untuk melakukan verifikasi berkas serta akan dilakukan cek kelengkapan dokumen. Apabila berkas lengkap dan memenuhi syarat maka *Area Finance Center Micro* akan meng-approval dan akan diotorisasi oleh *Area Finance Center Manager* untuk pencairan dana pembiayaan pada rekening nasabah. Namun apabila terjadi *reject* (batal cair) maka *Area Finance Center Micro* akan mengkonfirmasi kepada *MRM Team Leader*. *Reject* akan dikonfirmasi kepada nasabah. Untuk pencairan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui *teller*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses prosedur pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah memiliki beberapa tahapan dalam mengajukan permohonan pembiayaan ini yaitu beberapa prosedur yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Adapun tahapan prosedur analisis kelayakan pembiayaan ini

mencakup 7 tahapan yaitu; pengajuan permohonan pembiayaan, BI checking, pemeriksaan tempat (survey), Analisa pembiayaan, pendatanganan akad, pembukaan rekening dan pencairan akad. Pada tahapan analisa pembiayaan dilakukan untuk dapat menilai kelayakan pembiayaan calon nasabah secara lebih dalam lagi dengan menggunakan prinsip 5C tersebut. Selain menggunakan prinsip 5C, bank BSI KCP Lombok Aikmel mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kewaspadaan terhadap risiko yang akan terjadi serta tentunya menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan KUR dapat membantu para pelaku usaha dalam memulai menjalankan bisnisnya, serta berperan memberikan informasi mengenai siklus perputaran usaha agar tetap stabil sehingga dapat membantu dalam mengembangkan usaha nasabah agar lebih berkembang lagi.

Adapun saran penulis sampaikan yang pertama, untuk bank di sarankan mempercepat proses persyaratan pengumpulan data awal agar mempercepat proses tahap selanjutnya seperti bi Checking dan survey. Yang kedua, untuk bank disarankan mahasiswa yang magang memberikan pelatihan tantangan seperti dalam mengikuti survey lapangan atau edukasi nasabah yang lebih insentif tentang etika syariah dan analisis kredit. Ini dapat meningkatkan kualitas staff masa depan.

REFERENSI

- Akuntansi Dasar Sesuai Dengan SAK EMKM. (2023). Books @ Books.Google.Co.Id. In *Hukum Perumahan* (p. 482). https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gb_s_navlinks_s
- Alya, U., & Rahman, T. (2024). Bank Syariah Indonesia KUR Program Strategy in Improving the Community Economy in Batu City. *Jurnal Perbankan Syariah*, 10(1), 74–84.
- Antonio, M. Syafi'i (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Inkad, M. (2023). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Mikro di Pasar Leuwiliang. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 868–879.
- Journal, D., Education, O., Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). *Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka : (Independent Campus Learning Curriculum:)*. 8(1), 185–201.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (20003). Informasi pembiayaan syariah. <https://dbm.kneks.go.id>
- Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. (2022). Impact of the Independent Campus Learning Policy (MBKM) at private Universities in Indonesia. *EDUKATIF : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 675–685. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>